

HAK DAN KEWAJIBAN *ABDI DALEM* DALAM PEMERINTAHAN KRATON YOGYAKARTA*

Agus Sudaryanto**

Abstract

The result of this research indicates that the rights and obligations of abdi dalem in Kraton Yogyakarta have varieties, it depends on their status and function in the government of Kraton Yogyakarta. Some consideration or motivation to be abdi dalem kraton which are taking part in feeling kraton owned, maintaining of kraton culture, alive to be more meaningful, continuing of tradition from generation to the other, a tool of maintaining to magersari right or obtain the sultan's blessing.

Kata kunci: *abdi dalem, hak, kewajiban, pemerintahan, kraton.*

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Kraton Yogyakarta secara tradisional bagi masyarakat Jawa masih dianggap sebagai model yang patut ditiru dan dipertahankan di lingkungan masyarakatnya. Semua aspek kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial, politik ataupun pemerintahan yang dijalankan kraton dianggap sebagai representasi norma budaya Jawa yang *adiluhung*. Oleh karena itu, wajar jika sampai saat ini kiblat masyarakat Jawa terhadap kehidupan pemerintahan kraton masih merupakan keniscayaan. Dalam hal ini, sejarah mencatat bahwa Yogyakarta dengan Kraton Ngayogyakarta memberi sumbangan yang besar dalam perkembangan dan penciptaan nilai-nilai luhur bangsa. Kota Yogyakarta selama ini telah menjadi *melting pot* bagi budaya bangsa seluruh warga bangsa di Indonesia maupun internasional. Dengan

demikian, nilai-nilai budaya yang berkembang di Yogyakarta dengan keberadaan Kraton Yogyakarta mempunyai peran yang signifikan bagi pembangunan masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat global.¹

Nilai-nilai budaya bangsa seperti yang terkandung dalam kehidupan kraton memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini. Salah satu aspek yang cukup penting dan dapat menunjang keberadaan Kraton Yogyakarta adalah bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan kekuasaan kraton nampaknya mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa gelar yang diberikan bagi *abdi dalem* (pegawai kraton) oleh pihak Kraton Yogyakarta dapat dijadikan indikasi status dan posisinya. Misalnya kedudukan *bekel* akan

* Laporan Penelitian Tahun 2005.

** Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹ Chamamah Soeratio, 2003, "Kata Sambutan" pada *Seminar* Menapak Jejak Sejarah Memberi Makna ke Depan, Yayasan Pengkajian Naskah dan Sejarah, Yogyakarta, hlm. 1-2.

berbeda dengan *lurah*, *wedono* atau *bupati nayoko*.²

Kehidupan pemerintahan Kraton Yogyakarta yang relatif jauh dari konflik dapat diasumsikan, bahwa semua lapisan sosial di kraton mampu mengatur kehidupannya secara harmoni sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip *rukun*. Menurut Geertz, *rukun* merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial; mempunyai pengertian serasi, kerja sama, gotong royong dan peniadaan perselisihan.³ Lapisan sosial di kraton sesuai dengan piramida, struktur sosial setelah raja dan *sentono dalem* (kerabat raja) adalah para abdi dalem yang jumlahnya cukup besar. Para *abdi dalem* ini mempunyai kedudukan cukup terhormat. Mereka dituntut untuk tidak menonjolkan kepentingan pribadi (*sepi ing pamrih*) tetapi harus menjalankan tugasnya secara aktif (*rame ing gawe*), sehingga diharapkan mampu membuat kehidupan dunia di suatu tempat menjadi teratur dengan indah (*mamayu hayuning bawana*).⁴

Menurut Hukum Adat Ketatanegaraan (pemerintahan) adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat, susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat dan peradilan adatnya.⁵ Dengan demikian, para *abdi dalem* tidak dapat dinafikan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kraton Yogyakarta. Berdasarkan fakta historis Kraton Yogyakarta sangat dominan dipenga-

ruhi oleh pandangan Jawa dan Islam. Oleh karena itu, masalah pemerintahan di lingkungan kraton perpaduan tradisi Jawa dan Islam pun sulit dielakkan pengaruhnya. Hal ini direfleksikan pada gelar yang disandang oleh sultan, *Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga, Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hak dan kewajiban apa saja yang dapat diperoleh bagi para *abdi dalem* sebagai konsekuensi menjadi salah unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Kraton Yogyakarta ?
- b. Apa alasan pendorong seseorang menjadi abdi dalem Kraton Yogyakarta ?

C. Metode Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi para *abdi dalem* yang paham tentang struktur, kedudukan dan posisi dalam pemerintahan Kraton Yogyakarta. Selain itu, nara sumber ada dua orang, satu berasal dari *Parentah Hageng* sebagai pusat kepegawaian dan administrasi; sedangkan yang kedua berasal dari *Tepas Dwarapura*. Jumlah informan ditentukan 11 orang tetapi jika dilihat kepangkatannya hanya diambil 7 pangkat di antara 11 pangkat yang ada di kraton. Dalam

² Chamamah Soeratno, Eds, 2002, *Kraton Jogja The History and Cultural Heritage*, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan IMA, Jakarta, hlm. 44.

³ Hildred Geertz, 1983, *Keluarga Jawa*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 51.

⁴ Niels Mulder, 1985, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 55-56.

⁵ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.168.

⁶ Chamamah Soeratno, *Op.cit*, hlm. 26-28.

pengumpulan data lapangan ini *the informational saturation point* lebih diutamakan. Artinya, jika pengumpulan data yang diperoleh dari informan sudah tidak ada lagi tambahan informasi baru, maka data dianggap cukup memadai dan dihentikan, jika tetap diteruskan menambah data akan mengakibatkan *redundancy*.⁷

Dalam penelitian ini alat utama yang digunakan adalah pedoman wawancara dan buku catatan lapangan (*field note*). Selama proses pengumpulan data melalui wawancara ini, dilakukan pencatatan hasil wawancara. Hal ini dimaksudkan agar semua data dapat tersimpan dengan baik sehingga tidak ada data dari lapangan yang hilang. Penentuan informan di lingkungan *abdi dalem* kraton di Kota Yogyakarta didasarkan pada teknik *non-probability sampling* khususnya *purposive sampling*.⁸ Setelah catatan lapangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian data diklasifikasikan dan dipisahkan berdasarkan tema (koding). Hasil koding ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pemerintahan Kraton

Setelah Kraton Yogyakarta dan Pakualaman bergabung pada Negara Kesatuan RI melalui amanat Sri Sultan HB IX tanggal 5 September 1945 maupun amanat Sri Paku Alam VIII tanggal 30 Oktober 1945, sejak itu sampai sekarang pemerintahan kraton hanya terbatas pada lingkungan kraton dan hanya untuk kraton sendiri. Pelaksanaan pemerintahan kraton, sultan dibantu teru-

tama oleh *rayi dalem* (adik-adik sultan) dan para abdi dalem. Berdasarkan *Dawuh Dalem* Sultan Hamengku Buwono X Angka: 01/DD/ HB.X/EHE-1932 sistem pemerintahan kraton Yogyakarta terdiri atas:

- a. *Sri Narendro*, yaitu Ngarsa Dalem Sampayan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng ing Ngayogyakarta Hadiningrat.
- b. *Panimbang*, siapa saja yang diminta oleh sultan untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan keadaan dalam kraton.
- c. *Pandhite*, siapapun yang diminta oleh sultan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan berdasarkan kajian yang berkaitan dengan masalah agama, adat, seni, budaya, ekonomi, politik, hukum dan sosial.
- d. *Kawedanan Hageng Punokawan*, sebuah badan yang menjalankan sebagian pemerintahan kraton yang bersifat teknis.
- e. *Kawedanan Hageng*, sebuah badan yang menjalankan sebagian pemerintahan kraton yang bersifat administrasi fungsional.
- f. *Kawedanan*, pelaksana teknis operasional
- g. *Tepas*, pelaksana teknis administrasi.
- h. *Golongan*, kumpulan para abdi dalem yang mempunyai pekerjaan atau tanggungjawab yang sama. Penggolongan ini dimaksudkan untuk menjalankan pekerjaan yang teknis operasional sifatnya.

Apabila dicermati *Kawedanan Hageng Punokawan* dan *Kawedanan Hageng* sebetulnya merupakan gabungan dari bebe-

⁷ S.L., Schensul, et.al, 1999, *Essential Ethnographic Methods*, AltaMira Press, California, hlm. 262.

⁸ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87-88.

rapa *kawedanan* dan *tepas*. Masing-masing *Kawedanan Hageng Punokawan* (3 buah) dan *Kawedanan Hageng* (1 buah) dikoordinasi oleh adik-adik sultan. Masalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. *Kawedanan Hageng Punokawan* (KHP) *Parwa Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Yudaningrat, terdiri dari
 - 1) KHP Krida Mardawa (kesenian)
 - 2) *Kawedanan Pengulon* (keagamaan)
 - 3) *Kawedanan Puralaya* (pemakaman)
 - 4) *Kawedanan Keputren* (keputrian)
- b. *Kawedanan Hageng Punokawan Nitya Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Prabukusumo, terdiri dari
 - 1) KHP Widya Budaya (upacara kraton)
 - 2) KHP Purayakara (aktiva terutama lampu dan barang kraton)
 - 3) *Tepas Banjar Wilapa* (perpustakaan)
 - 4) *Tepas Musium* (barang milik kraton)
 - 5) *Tepas Pariwisata*
- c. *Kawedanan Hageng Punokawan Parasraya Budaya* dikoordinasi atau diketuai oleh KGPH Hadiwinoto, terdiri dari
 - 1) KHP Wahana Sarta Kriya (kendaraan, kebersihan dan pemeliharaan)
 - 2) KHP Puraraksa (keamanan)
 - 3) *Tepas Panitikisma* (kewarisan)
 - 4) *Tepas Keprajuritan*
 - 5) *Tepas Halpitapura* (pembelian keperluan kraton)
 - 6) *Tepas Security* (keamanan)
- d. *Kawedanan Hageng Panitra Pura* dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Joyokusumo dan wakilnya GBPH Cokrodingrat, terdiri dari
 - 1) *Parentah Hageng* (pusat administrasi atau kepegawaian)
 - 2) *Kawedanan Hageng Sri Wandawa* (ke-sejahteraan-sosial)
 - 3) *Tepas Dwarapura* (penghubung dengan pihak luar)
 - 4) *Tepas Darah Dalem* (silsilah kraton)
 - 5) *Tepas Rantam Harta* (penganggaran kraton)

- 6) *Tepas Danartapura* (pengeluaran uang)
- 7) *Tepas Witardana* (penyimpanan uang)

2. **Abdi Dalem Kraton**

Abdi dalem dalam konteks penelitian ini adalah orang yang sanggup menjadi abdi budaya Yogyakarta dan sudah mendapatkan ketetapan atau *kekancingan* (Surat Keputusan atau Surat Pengukuhan) yang dikeluarkan oleh pihak Kraton Ngayogyakarta. Berdasarkan *pranatan kalenggahan* Nomor: 01/Pran/KHPP/XII/2004 dan juga hasil wawancara dengan nara sumber dan informan status abdi dalem dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu *abdi dalem Punokawan* dan *abdi dalem Kaprajan*.

Para *abdi dalem Punokawan* merupakan abdi dalem yang mendapatkan gaji dari pihak kraton melalui *Tepas Danartopuro*; sedangkan *abdi dalem Kaprajan* pada prinsipnya tidak berhak gaji dari kraton tetapi mendapatkannya dari pihak pemerintah RI. Dengan demikian, *abdi dalem Kaprajan* itu pada prinsipnya hanya sebagai abdi dalem *caos* (datang ke kraton sebagai pengakuan sebagai abdi dalem) dan tidak mempunyai beban tugas dari pihak kraton (*jobless*). Hal ini berbeda dengan *abdi dalem Punokawan*, bagi golongan ini secara kelembagaan diakui oleh pihak kraton sebagai salah satu perangkat pemerintahan kraton dan sebagai konsekuensinya mereka mendapatkan tugas atau pekerjaan tertentu.

3. **Hak dan Kewajiban Abdi dalem**

a. **Hak-hak Abdi Dalem Kraton**

1). **Kepangkatan**

Jika dilihat dari jenjang pangkatnya (*kalenggahan*) terdapat sebelas macam yang berhak disandang para abdi dalem, baik abdi dalem *Punokawan* maupun *Kaprajan*.

Adapun macam atau jenis pangkat yang kemungkinan dapat disandang tersebut adalah *jajar, bekel, lurah, penewu, wedono, riyu bupati anom, bupati anom, bupati sepuh, bupati kliwon, bupati nayoko* dan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH). Penetapan pangkat

dan gelar itu merupakan hak prerogatif sultan tetapi dalam prosedur pelaksanaannya melalui dan diketahui terlebih dahulu adik sultan. Berbagai jenjang kepangkatan para abdi dalem tersebut dapat dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 1
Jenjang Kepangkatan Abdi Dalem Punokawan dan Kaprajan
Berdasarkan Pranatan Kalenggahan No. 01/Pran/KHPP/XII/2004

Urutan		Pangkat	Peg.Neg.Sipil		Kepolisian	TNI-AD
Puno kawan	Kaprajan		Pangkat	Gol.		
1	1	KPH			Jenderal	Jenderal
2	2	Bupati Nayoko	Pem.Utama	IV e	Kom Jen	Let Jen
3	3	Bupati Kliwon	Pem.Ut.Mdy	IV d	Ir Jen	May jen
4	4	Bupati Sepuh	Pem.Ut.Md	IV c	Brig jen	Brig Jen
5	5	Bupati Anom	Pembina I	IV b	Kom Bes AKBP	Kolonel Let Kol
			Pembina	IV a	Kompol	Mayor
6	6	Riyu Bup. Anom	Penata I	III d	AKP	Kapten
			Penata	III c	Ip-tu Ip-da	Let-tu Let-da
7	7	Wedono	Pen.Md I	III b	A Ip-tu	Pbt.Let-tu
			Pen.Md	III a	A Ip-da	Pbt.Let-da
8	8	Penewu	Pengatur I	II d	Bripka	Serma
			Pengatur	II c	Brigpol	Serka
9	9	Lurah	Peng.Md I	II b	Briptu	Sertu
			Peng.Md	II a	Bripda	Serda
10	10	Bekel	Juru I	I d	Aj.Brip	Kopka
			Juru	I c	Aj.Briptu Aj.Bripda	Koptu Kopda
11	11	Jajar	Juru Md I	I b	Bharaka	Praka
			Juru Md	I a	Bharatu Bharada	Pratu Prada

Berdasarkan tabel di atas, para abdi dalem mempunyai kesempatan menyandang pangkat dari jajar sampai dengan KPH. Namun berdasarkan keterangan salah satu nara sumber dinyatakan bahwa pangkat tertinggi KPH merupakan pangkat yang disandang oleh abdi dalem yang termasuk langka. Pangkat KPH yang telah diberikan kepada abdi dalem masih jarang karena

sangat tergantung kebijakan sultan (*ka-wicaksanaaan-mirunggan*). Beberapa orang yang telah diberi gelar KPH ini antara lain Sudarisman (mantan walikota Yogyakarta), putra mantu, dan Direktur Madukismo.

Berkaitan dengan masalah pangkat ini, nara sumber dari Kawedanan Hageng Panitrapura menyatakan bahwa bagi abdi dalem

Punokawan dapat dipastikan kepangkatannya harus melalui magang, dari jajar, bekel dan seterusnya sampai dengan KPH. Pada umumnya masa magang (calon abdi dalem) berkisar antara 2 – 5 tahun dan masa ini dijadikan pertimbangan tentang kedisiplinan serta kesetiiaannya pada kraton. Kenaikan pangkat dari satu ke pangkat lainnya kurang lebih 4 – 5 tahun. Walaupun demikian, jika sultan sedang berkenan (*mirunggan*) pangkat seorang abdi dalem dapat dipercepat atau melompat. Sebagai contoh Ki Timbul Hadi Prayitno dapat meloncat dari pangkat *bekel* langsung mendapatkan pangkat *riyo bupati anom*.

Bagi abdi dalem Kaprajan pada umumnya tidak melalui magang. Hal ini dikarenakan begitu masuk menjadi abdi dalem, pangkatnya disesuaikan dengan pangkat atau golongan di kantor pemerintahnya. Jika abdi dalem Kaprajan di kantor pemerintahnya termasuk golongan Ia atau I b, maka di kraton akan langsung mendapat pangkat jajar. Golongan I c dan I d langsung akan mendapatkan pangkat bekel, sedangkan golongan II a dan II b mendapatkan pangkat *lurah*. Begitu seterusnya sesuai dengan tabel di atas. Pada prinsipnya kepangkatan di kraton bagi abdi dalem Kaprajan disesuaikan dengan pangkat formal yang dimilikinya. Namun ada batasannya, bahwa pangkat pertama kali masuk sebagai abdi dalem tidak dapat lebih dari *Wedono*.

2). Gelar Nama

Para abdi dalem selain berhak menyanjung suatu pangkat tertentu, ternyata juga mempunyai hak untuk mendapatkan gelar nama yang diselaraskan dengan bidang pekerjaan atau keahliannya. Pemberian gelar

nama ini diberikan kepada abdi dalem atas nama sultan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala bagian kerjanya (kawedanan atau tepas) dan Parentah Hageng Kraton.

Dalam pemberian gelar nama, jika seorang abdi dalem dapat membuktikan dengan suatu surat keterangan bahwa dia masih merupakan keturunan bangsawan, maka gelar namanya akan ditambah dengan Raden. Surat keterangan asal usul darah dalem tersebut harus dimintakan pengesahan di Tepas Darah Dalem. Surat ini dilampirkan bersamaan dengan persyaratan lainnya. Seorang wedono yang masih mempunyai kaitan dengan darah dalem, ia selain berpangkat wedono, maka di depan wedono ditulis Raden. Beberapa gelar nama yang diberikan oleh kraton pada abdi dalem sesuai dengan keahliannya dapat disebutkan se-bagai berikut :

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1) projo | diberikan pada pegawai pemda |
| 2) danu | diberikan pada bagian peteranakan |
| 3) karti | diberikan pada bagian umum |
| 4) tirta | diberikan pada bagian pengairan |
| 5) ranu | diberikan pada bagian air minum |
| 6) dirjo | diberikan pada bagian ekonomi |
| 7) dwijo/marto | diberikan pada bagian guru |
| 8) niti | diberikan pada bagian hukum |
| 9) noyo | diberikan pada bagian pengawasan |
| 10) sastro | diberikan pada bagian kepegawaian |
| 11) cermo | diberikan pada bagian pedalangan |
| 12) broto | diberikan pada bagian pendidikan |

Berbagai nama yang dapat dijadikan indikasi tugas atau keahlian abdi dalem tersebut dalam pemberiannya tidak mandiri.

Artinya berbagai nama indikasi keahliannya itu tidak berdiri sendiri, umumnya terangkai dengan nama lengkap lainnya. Jika abdi dalem masih mempunyai kaitan dengan darah dalem, sudah haji, mempunyai pangkat wedono dan berlatar belakang sebagai ahli hukum, bergelar SH., M.H, maka gelar nama dari kraton komplitnya menjadi Raden Wedono H. Widyonitikarenggo, SH, M.H. Namun, jika abdi dalem yang tidak mempunyai kaitan darah dalem, mempunyai pangkat *wedono*, mempunyai keahlian bidang pedalangan, maka gelar nama dari kraton komplitnya menjadi Mas Wedono Cermogupito. Dengan demikian sebetulnya antara pangkat dan pemberian gelar nama dari kraton tersebut tidak dipisahkan. Pangkat dan gelar nama tersebut sudah terpadu saat mendapat Surat Penetapan (*kekancingan*) sebagai abdi dalem.

3). Gaji

Abdi dalem Kaprajan di Kraton Yogyakarta pada dasarnya tidak mempunyai hak gaji. Ketentuan ini dapat terlihat dengan jelas pada surat penetapan sebagai abdi dalem kraton. Bagi abdi dalem Kaprajan dalam surat tersebut tidak disebutkan tentang masalah gaji. Oleh karena itu, pihak kraton tidak berkewajiban memberikan gaji pada abdi dalem jenis ini. Namun bagi abdi dalem Punokawan secara formal berhak mendapatkan gaji dari pihak kraton. Kewajiban kraton untuk memberikan gaji pada abdi dalem jenis ini terlihat dengan jelas pada surat penetapan seseorang menjadi abdi dalem. Dalam surat *kekancingan* tersebut secara tegas bahwa pi-

hak kraton akan memberikan gaji pada abdi dalem Punokawan dengan sejumlah uang tertentu. Pada umumnya para abdi dalem Punokawan jika diminta keterangan jumlah penerimaan gajinya, maka mereka menghindari dan tidak mau menyebutkan besarnya gaji sebagai abdi dalem tiap bulannya.

Berkaitan masalah gaji di Kraton Yogyakarta ini Penghageng Kawedanan Punokawan Purwa Budaya GBPH Yudaningrat menyatakan bahwa penggajian abdi dalem mengandalkan uang dari sewa *Sultan Ground*, pengelolaan sejumlah museum milik kraton, dan Sarinah. Bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 60.000.000,- per tahun atau Rp 5.000.000,- per bulan. Anggaran ini akan habis untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan kraton. Yudaningrat menjelaskan bahwa gaji Sultan HB X hanya sebesar Rp 200.000,- per bulan, GKR Hemas sebagai permaisuri sultan Rp 12.500,- per bulan, dan para pangeran di kasultanan ini mendapatkan gaji antara Rp 30.000,- hingga Rp 40.000,- per bulan. Adapun para abdi dalem diberi gaji (*kucuh dalem*) antara Rp 2000,- sampai Rp 20.000,- per bulan. Gaji tersebut sangat kecil dan jauh di bawah standar upah minimum propinsi (UMP) DIY Rp 400.000,- per bulan, bahkan direncanakan akan naik menjadi Rp 460.000,- per bulan mulai awal tahun 2006.⁹

Dengan jumlah gaji seperti di atas, membuktikan bahwa motivasi para abdi dalem menjadi unsur pemerintahan kraton bukan masalah materi, tetapi lebih dominan termotivasi oleh hal-hal yang bersifat pengabdian dan non materi. Ada kebiasaan me-

⁹ Kompas, 2005, "Pengabdian dan Pilar Kebudayaan Keraton", 3 Desember, hlm. 35.

narik yang berkaitan dengan gaji dari kraton yang disampaikan oleh informan. Mereka menyatakan bahwa *sih dalem* (tanda kasih sultan) ini tidak dibelanjakan oleh sebagian para abdi dalem, melainkan disimpan atau ditabung karena menurut kepercayaan *sih dalem* ini adalah sebagai uang berkah. Oleh karena itu, jika tidak terpaksa sekali uang ini sedapat mungkin akan ditabung, tidak dibelanjakan secara langsung.

4). Kesejahteraan

Kesejahteraan bagi para abdi dalem Purnokawan sementara ini hanya berupa bantuan kesehatan, jika mereka sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Para abdi dalem ini mendapat uang kesejahteraan atau bantuan biaya kesehatan asalkan dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan dari pihak rumah sakit. Tinggi rendahnya uang kesejahteraan ini tidak sama antara para abdi dalem karena sangat bervariasi. Uang bantuan kesehatan ini tergantung kepangkatan yang dimiliki oleh abdi dalem. Semakin tinggi pangkatnya akan semakin tinggi besarnya uang kesejahteraan yang akan diterimanya.

Adapun besar bantuan dari pihak kraton menurut nara sumber berkisar antara ratusan ribu rupiah. Misalnya, pangkat Bekel berhak mendapatkan bantuan kesehatan sejumlah Rp 200.000,-, Wedono Rp 500.000,- dan Bupati Rp 750.000,-. Apabila dibandingkan dengan gaji abdi dalem, maka uang bantuan kesehatan terasa lebih besar jumlahnya. Pi-

hak kraton sangat memahami bahwa sebagian besar abdi dalem kraton telah berusia tua sehingga masalah kesehatan perlu diperhatikan. Kekuasaan sultan yang besar untuk menentukan kesejahteraan abdi dalem dapat diartikan bahwa wewenang sultan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kekuasaan sultan yang sangat kuat disebut *wenang wisesa ing sak ngari* (berkuasa di seluruh negeri) dan *gung binathara, bahu dhendha nyakrawati* (sebesar kekuasaan dewa, pengendali hukum dan penguasa dunia)¹⁰ tidak dijadikan legitimasi untuk memenuhi kepentingan pribadi sultan semata. Prinsip tahta untuk rakyat (*throne for the people*) yang dijalankan sejak Sultan HB IX indikasinya masih berjalan dalam pemerintahan kraton hingga kini.

5). Pensiunan

Sebagaimana dikatakan oleh Gibson dan dikutip oleh Dwiyanto, bahwa salah satu faktor yang menentukan tingkat kerja aparat pelayanan publik adalah penerapan sistem insentif. Sistem ini merupakan elemen penting dalam suatu organisasi untuk memotivasi karyawan mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Insentif yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi berupa penghargaan materi maupun non materi. Sasaran utama penerapan insentif adalah menarik orang yang berkualifikasi untuk bergabung dalam organisasi, mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja dan memotivasi karyawan mencapai prestasi tinggi.¹¹

¹⁰ Hans Antlov dan Sven Cederroth, 2001, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xvii.

¹¹ Agus Dwiyanto, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, hlm.202.

Dalam hal ini tampaknya pihak kraton pun menerapkan prinsip insentif untuk memotivasi para abdi dalem agar mau bertahan sebagai salah satu unsur pemerintahan kraton. Pihak kraton tetap memberikan penghargaan atau insentif berupa gaji pensiun kepada para abdi dalem Punokawan. Para abdi dalem ini berhak mendapatkan hak gaji pensiun jika telah mengabdikan selama kurun waktu tertentu. Salah satu nara sumber dari Parentah Hageng Kraton menjelaskan bahwa abdi dalem yang tidak dapat meneruskan *caos* atau kewajibannya sebagai abdi dalem karena sakit atau tua oleh kraton diberi hak mendapatkan gaji pensiun. Jika abdi dalem berhenti karena sakit (*sudono saroyo*) dapat hak gaji pensiun sebesar 40 %, sedangkan jika berhenti karena sudah tua dan sudah mengabdikan selama lebih dari 25 tahun (*sudono mulyo*), maka mereka berhak mendapatkan gaji pensiun secara penuh. Dengan adanya ketentuan bahwa abdi dalem yang sakit atau tua berhak gaji pensiun menjadikan mereka merasa masih dianggap (*diwongke*) sebagai bagian dari unsur pemerintahan kraton. Hal menjadikan kebanggaan tersendiri bagi para abdi dalem, karena pihak kraton tidak menerapkan peribahasa habis manis sepah dibuang.

b. Kewajiban Abdi Dalem

1). *Caos*

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu

pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lain. Kalau ada hak maka ada kewajiban, tanpa ada hak tentunya tidak ada kewajiban.¹² Kewajiban antara satu *abdi dalem* dengan *abdi dalem* yang lain berbeda dan sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung kepada kelompok, tugas, dan pangkat yang dimiliki oleh abdi dalem.

Bagi abdi dalem Punokawan terdapat dua tipe atau jenis, yaitu Punokawan *caos* dan punokawan *tepas*. Punokawan *caos* ini berkerja secara normal sesuai aturan pada umumnya, yaitu *sowan* atau kerja normal 12 hari sekali dan datang pada Hari Selasa Wage saat *wiyosipun dalem*. Bagi para abdi dalem Punokawan *tepas* berkerja di kantor pemerintahan kraton, maka *sowan* atau datangnya setiap hari. Menurut keterangan dari dua informan yang diwawancarai, *sowannya* setiap hari. Satu informan menyatakan bahwa tugasnya adalah membersihkan museum kereta keraton setiap hari, sedangkan lainnya juga datang setiap hari karena abdi dalem ini berkantor di bagian administrasi pemerintah kraton Yogyakarta. Pada saat abdi dalem *caos* atau menjalankan tugas, maka mereka diwajibkan memakai pakaian *mataraman/Jawa (pranakan)*. Bagi abdi dalem *keprajan*, jika masih aktif sebagai PNS maka kewajibannya hanya *caos* (datang) dalam upacara-upacara adat yang dilakukan oleh pihak kraton; seperti syawalan, labuhan, siraman pusaka, Selasa Wage (penobatan sultan), dan muludan atau grebeg. Jika sudah pensiun atau tidak aktif sebagai PNS dan diminta membantu di kan-

¹² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37-39.

tor (*tepas*) pemerintahan kraton, maka selain diwajibkan mengikuti upacara-upacara adat tersebut diwajibkan juga *caos* atau *sowan bekti* lebih intensif lagi. Para abdi dalem ini paling tidak mempunyai kewajiban datang ke kraton sekitar 1-3 kali dalam seminggu dari jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB.

2). Presensi

Untuk mengetahui abdi dalem datang atau tidak, maka pihak kraton dapat melihat daftar presensi yang disediakan. Adapun bukti kedatangan para abdi dalem kraton diketahui oleh atasannya (*pengirit*) atau teman pada waktu tugas yang dipercaya oleh atasan untuk memberikan presensi bagi abdi dalem yang datang. Dalam hal ini presensi cukup penting, karena bukti kedatangan ini sangat signifikan terhadap kelancaran kenaikan pangkat. Salah satu abdi dalem *wedono* menyatakan bahwa jika sudah menduduki pangkat selama lima tahun dan persyaratan yang berkaitan dengan ketaatan, kedisiplinan maupun tata kramanya memadai, maka abdi dalem tersebut pada prinsipnya berhak mengajukan kenaikan pangkat (*weling ngunjuk*). Adapun kenaikan pangkat ini diajukan oleh ketua kelompok, bukan oleh abdi dalem sendiri. Dengan demikian, masalah presensi merupakan hal yang esensial dalam pembuktian tentang ketaatan dan kedisiplinan pada kraton bagi para abdi dalem.

3). Mengikuti Upacara Adat

Sebagai penjaga dan penyangga budaya kraton, maka keberadaan abdi dalem sama

penting nilainya dengan berlangsungnya upacara adat. Raja atau kerabat kraton sendiri tidak mampu melaksanakan upacara adat tanpa keikutsertaan para abdi dalem. Dalam kaitan ini proses pelembagaan terhadap upacara adat kraton hendaknya terus dijalankan agar norma tersebut diterima oleh para pihak. Adapun proses agar berbagai upacara adat menjadi melembaga, maka norma itu perlu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh para *stakeholder*.¹³ Pelbagai upacara adat ini idealnya tidak hanya dilembagakan (*institutionalized*) tetapi lebih dari itu yaitu diperlukan diinternalisasikan (*internalized*). Berdasarkan keterangan dari informan dikatakan bahwa upacara adat yang dilakukan oleh pihak kraton adalah : Garebeg Besar (Hari Raya 'Idul Adha), Garebeg Mulud (memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW), Garebeg Syawal (Hari Raya 'Idul Fitri), Siraman Pusaka (membersihkan pusaka kraton), Labuhan (membuang barang ke tempat yang dianggap suci, yaitu laut atau gunung).

Berbagai macam upacara adat tersebut, secara moral wajib dihadiri oleh semua abdi dalem kraton, baik abdi dalem *Punokawan* maupun abdi dalem *Kaprajan*. Apabila abdi dalem tidak aktif datang pada upacara adat ini dapat dikatakan masalah kepatuhannya pada kraton dipandang masih kurang memadai. Akibatnya nanti akan berpengaruh terhadap proses kelancaran kenaikan pangkat para abdi dalem. Pihak kraton memandang sangat penting keterlibatan para abdi dalem dalam upacara adat ini, karena diharapkan agar abdi dalem ini memahami dan

¹³ Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 224.

menjalankan ajaran P. Sember Nyawa yang dikenal sebagai Tri Darma, yaitu *mulat sari-ra*, *hangrasa wani* (introspeksi), *rumangsa melu handarbeni* (merasa memiliki) dan *wajib melu hanggondeli* (ikut mempertahankan).¹⁴

4. Motivasi atau Faktor Pendorong Abdi Dalem

a. Ketenteraman atau Ketenangan Hidup

Fenomena kehidupan masyarakat Jawa yang menitikberatkan pada kesederhanaan, harmoni, selaras dengan alam akhir-akhir ini semakin ditinggalkan. Hal ini karena orang lebih cenderung mengutamakan kehidupan duniawi daripada rohani. Para abdi dalem yang masih kental filsafat hidup kejawaannya tidak mau larut dalam kehidupan duniawi yang hanya memikirkan materi atau harta semata. Bagi mereka ada kehidupan yang lebih berarti, yaitu memperkaya rohani atau kehidupan batin. Dalam upaya mewujudkan kehidupan batin tersebut ketenteraman dan ketenangan jiwa menjadi utama. Pengabdian mereka terhadap kraton umumnya dilandasi pemikiran akan perlunya ketenteraman dan ketenangan dalam hidup. Walaupun rejeki dari kraton jumlahnya kecil namun mereka percaya bahwa akan ada suatu jalan lain untuk mendapatkan rejeki, baik melalui ketrampilan maupun jasa/kepandaian yang mereka punyai.

Kebanyakan para abdi dalem ini menjadi menyadari bahwa *urip mung mampir*

ngombe (hidup manusia itu ibarat hanya numpang minum) sehingga mereka dalam hidupnya dapat tenang dan tenteram. Sikap dan pandangan yang seperti ini mengakibatkan mereka menjadi *narima ing pandum*. Hal ini selaras dengan peribahasa Jawa yang menyatakan bahwa *bandha iku mung titipan, anak titipan lan nyawa gadhuan* (harta itu hanya titipan, anak titipan dan nyawa pinjaman).¹⁵ Dengan begitu, abdi dalem memahami bahwa seseorang akan kaya atau miskin itu sudah suratan takdir masing-masing individu. Keadaan hidup yang berbeda antara orang satu dengan lainnya itu merupakan sunatullah (Hukum Allah). Prinsip *narima ing pandum* (menerima takdir secara ikhlas) ini tampaknya menjadikan motor penggerak dan motivator mereka sehingga hati dan pikiran akan menjadi tenang dalam menghadapi problema kehidupan.

b. Berkah

Berkah atau *sawab* (Jawa) adalah kata kunci untuk memahami motivasi dan pendorong abdi dalem dalam mengabdikan di kraton. Berkah sifatnya abstrak tetapi nilainya begitu kuat dan dijadikan pegangan para abdi dalem. Mereka bekerja karena mengharap berkah dari sultan. Berkah merupakan sesuatu yang sifatnya non material, yaitu berupa kedamaian dan ketenteraman hidup. Berkah selalu dicari dalam hidup orang Jawa, karena hal ini berarti ada pengaruh atau syafaat yang akan menuntun manusia untuk hidup tenang, kecukupan, dan selamat.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, 1994, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 176-177.

¹⁵ Pardi Suratno dan Henniy Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana (Tiara Wacana Yogya Grup), Yogyakarta, hlm. 151.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa alasan mencari berkah merupakan motivasi yang dominan dalam pengabdianya pada kraton.

Para abdi dalem meyakini, bahwa apabila seseorang telah mendapat berkah dari sultan, maka masalah kecukupan materi tidak lagi menjadi prioritas mereka. Ketentraman hati dan keselamatan itulah yang mereka cari karena hal ini nilainya lebih tinggi dari pada masalah materi. Jika dilihat dari gaji, dapat dikatakan tidak akan cukup untuk ongkos perjalanan pulang pergi dari rumah ke kraton. Semua abdi dalem menyatakan bahwa masalah gaji yang besar bukan merupakan tujuan tetapi ketentraman hati dan keselamatan merupakan hal lebih penting sebagai modal utama hidup. Seseorang tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik jika hatinya tidak *semeleh* (ikhlas pada takdir), tenang, dan kecukupan. Oleh karenanya harapan bagi para abdi dalem adalah berkah sultan akan membawa implikasi pada keselamatan dan kebahagiaan hidupnya.

c. Mempertahankan Identitas Diri dan Pelestarian Budaya

Beberapa informan yang mempunyai pangkat lurah ke bawah menyatakan bahwa salah satu alasan menjadi abdi dalem adalah agar mereka dapat memahami dan menjalani sopan santun (*unggah-ungguh*) menurut budaya Jawa. Para abdi dalem ini menyadari bahwa sekarang ini sopan santun yang bersumber dari budaya Jawa sudah mulai luntur dan banyak yang tidak dimengerti oleh

orang Jawa itu sendiri. Padahal sopan santun yang ada di kalangan orang Jawa itu sebenarnya sangat halus dan mempunyai nilai yang luhur. Hal ini dikarenakan orang Jawa selalu berpegang pada rasa dalam sikap dan tindakannya (*wong Jawa kuwi papaning rasa*).

Sopan santun atau tatakrama (*suba sita*) tidak dapat dipisahkan dengan masalah budi pekerti. Orang Jawa dikatakan budi pekerti luhur bila mampu menerapkan tatakrama secara baik dan benar atau tepat. Jika penerapan tatakrama kurang tepat, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu sudah tidak atau belum berjiwa Jawa (*wong Jawa ning ora njawani* atau *ilang Jawane*).¹⁶ Sebagai orang Jawa hendaknya mau merendahkan diri, merasa bodoh, dan berwatak atau bersikap menerima. Hal ini tidak berarti bodoh itu tidak tahu, orang yang tahu dirinya bodoh sesungguhnya dia cerdas. Apalagi didasari watak dan perilaku mau mengakui diri, mau menerima kenyataan bahwa semua kejadian yang dijalani dan menimpa kepada manusia itu sesungguhnya kehendak Tuhan. Dengan bersikap begitu, maka *pasrah* merupakan bagian budi pekerti dasar yang sangat esensial dalam kehidupan.¹⁷

Identitas diri orang Jawa yang berdasarkan pada perasaan dan mau menjalani kehidupan apa adanya sebagaimana yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ini dalam perkembangan menemui erosi dari budaya instan (pragmatis). Atmosfer Yogyakarta yang pada mulanya bernuansa spiritual telah didesak oleh semangat pragmatisme. Hal-hal yang menyangkut kepentingan fisik (materi) menjadi penting. Predikat Yogya-

¹⁶ Suwardi Endraswara, 2003, *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

karta sebagai kota budaya menjadi tergoncang. Menurut Joyokusumo semakin lama budaya instan semakin merasuki generasi muda, banyak yang bersifat *dhahirriyah*, bersifat kulit semata. Para pemuda inipun dalam memahami budaya Islam atau Jawa juga sifatnya kulit belaka.¹⁸ Sikap hidup, tatakrama dan budi pekerti yang merupakan warisan masa lalu (*heritage*) tersebut, jika dimungkinkan dikompromikan dengan budaya pendatang. Dengan demikian, nantinya akan tampak suatu *pacific penetration* antara kedua budaya yang ada. Dalam perembesan secara damai ini menurut Soemanto dengan alasan apapun budaya warisan tidak boleh dihancurkan. Budaya warisan ini hendaknya dijadikan referensi atau ensiklopedia untuk melihat situasi aktual setiap zaman.¹⁹

d. Tanah Magersari

Dua orang yang berpangkat magang dan seorang berpangkat bekel berasal dari abdi dalem Punokawan menyatakan bahwa faktor pendorong menjadi abdi dalem adalah karena mereka menempati tanah milik sultan (*Sultan Ground*). Hal ini berkaitan dengan nilai yang terdapat pada budaya Jawa mengajarkan adanya balas budi. Ada suatu kewajiban bagi seseorang yang telah menerima kebaikan untuk berusaha *males budi* (membalas kebaikan) yang diberikan oleh orang lain. Pembalasan kebaikan pada orang lain, seseorang tidak harus diperhitungkan secara kaku tentang kesetaraan nilai suatu kebaik-

an. Nilai budaya Jawa mengajarkan bahwa membalas kebaikan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan orang yang menerima bantuan.

Para abdi dalem yang mendapat kebaikan dari sultan untuk menggunakan tanah sultan baik sebagai tempat kediaman maupun sebagai lahan pertanian merasa berhutang budi pada kraton. Dalam hutang budi ini orang akan merasa tidak enak jika belum dapat membalas kebaikan pihak yang memberi. Masalah tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh nafsu kebendaan dan mementingkan pribadi masih dapat terkendali.

Apabila diamati hubungan antara abdi dalem dengan kraton didominasi interaksi yang bersifat resiprokal. Para pihak secara timbal balik masing-masing mempertukarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimilikinya.²⁰ Abdi dalem memberikan tenaga dan pikiran pada pihak kraton sedangkan pihak kraton memberikan tanah *magersari* kepada abdi dalem untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau garapan. Interaksi timbal balik ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong yang menjadi dasar hubungan kemasyarakatan. Para pengguna tanah *magersari* atau *indung* ini sudah sewajarnya membantu dan membalas kepentingan atau keperluan pemiliknya. Menurut Hadikusuma abdi dalem sebagai pengguna tanah *magersari* tersebut, sudah selayaknya mempunyai kewajiban moral untuk membalas kebaikan pihak kraton.²¹

¹⁸ Joyokusumo, 2005, "Wanita Jawa Sebagai Wanita Utama Seperti Dalam Al.Qur'an", dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini, Eds, *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyiyah-Adi Cita, Yogyakarta, hlm. 29.

¹⁹ *Kompas*, 2005, "Budaya Yogya, Membela Kemanusiaan", 7 Desember, hlm. D.

²⁰ Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109.

²¹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10-11.

e. Meneruskan Tradisi Orangtua

Para informan yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi Kraton Yogyakarta, menyatakan bahwa pengabdianya dilakukan dalam rangka menjaga nama baik keturunan serta kebiasaan yang telah turun temurun dari nenek moyangnya menjadi abdi dalem. Alasan ini bukan merupakan satu-satunya motivasi menjadi abdi dalem. Motivasi yang lain, adalah melestarikan budaya kraton, mencari berkah ataupun mencari ketenangan hidup.

Dalam masalah ini terlihat bahwa para abdi dalem mengerti, memahami dan membuktikan bahwa kebiasaan anggota keluarganya menjadi abdi dalem ternyata membawa pengaruh kedamaian dan kebaikan. Oleh karena itu, mereka menjadi yakin bahwa dengan menjadi abdi dalem kehidupannya juga akan menemui kebahagiaan. Para abdi dalem berprinsip kebiasaan yang baik, bagi mereka sangat penting untuk dipertahankan. Dengan menjadi abdi dalem harapannya hati menjadi tenang dan syahwat atau nafsu keduniawian akan dapat dikendalikan.

Hadikusuma menyatakan tentang proses terjadinya Hukum Adat, bahwa kebiasaan pribadi sangat potensial menjadi adat jika dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Jika adat menjadi abdi dalem ini, sudah seharusnya berlaku dalam masyarakat, maka kebiasaan pribadi tersebut menjadi Hukum Adat.²² Namun demikian, kebiasaan pribadi atau keluarga menjadi abdi dalem ini di Yogyakarta tampaknya belum menjadi adat sehingga masih jauh menjadi Hukum Adat. Dengan demikian tradisi menjadi abdi dalem

ini masih dalam taraf kebiasaan individu belum menjadi tradisi masyarakat.

Menurut sumber dari Parentah Hageng diperkirakan jumlah seluruh abdi dalem saat ini sekitar 3000-an orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Yogyakarta yang berjumlah sekitar 3.000.000 orang, maka dapat diperkirakan bahwa penduduk Yogyakarta yang berstatus sebagai abdi dalem hanya sekitar 0,1%. Prosentase ini menunjukkan bahwa menjadi abdi dalem belum atau kurang menarik sebagai pilihan hidup masyarakat Yogyakarta pada umumnya.

E. Kesimpulan

Ada persamaan antara birokrasi di kraton dan birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya dalam masalah kepegawaian. Keduanya mengenal adanya jenjang kepangkatan, masa *magang* (calon pegawai) kemudian baru menduduki pangkat yang terendah sampai dengan teratas. Masa kenaikan pangkat memerlukan waktu tertentu tergantung pada kepatuhan dan kedisiplinan para individu abdi dalem kraton. Kenaikan pangkat akan diberikan atas usul atasan langsung para abdi dalem /*pangirit*, kemudian disusul dengan Surat *Kekancingan* (Surat Pengu-kuhan/ Keputusan).

Hak dan kewajiban para abdi dalem kraton tidak begitu ketat seperti pada disiplin pegawai negara, mengingat mereka bekerja hanya sebaagai pengabdian. Kehadiran tetap diterapkan dan akan menjadi alat evaluasi kinerja abdi dalem. Adapun sanksi tidaklah berat, hanya yang bersangkutan akan lama proses kenaikan pangkatnya. Hak abdi dalem

²² Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1-2.

berupa gaji bulanan yang diberikan pada abdi dalem Punokawan tidaklah dilihat secara material mengingat nilainya masih kurang memadai. Namun yang mereka cari adalah *berkah* dari sultan atas kehidupannya. Hak lain sebagai abdi dalem adalah mendapat kartu pengenal sebagai abdi dalem, pensiun, dan mendapatkan tunjangan kesehatan dengan nilai yang telah ditentukan. Kesejahteraan ini besarnya berjenjang menurut

pangkat, tugas, dan kelompok. Hal tersebut kemudian juga dite-rapkan dalam kepegawaian PNS kita. Selain mencari *berkah*, ada motivasi lain seperti menjaga kelestarian budaya Jawa, mencari hidup yang lebih bermakna, ketenangan-ketenteraman, meneruskan tradisi orang tua, dan mempertahankan tanah magersari agar tetap dapat difungsikan sebagai tempat tinggal atau tanah garapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans dan Sven Cederroth, 2001, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi, 2003, *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 2000, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Geertz, Hildred, 1983, *Keluarga Jawa*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Kartodirdjo, Kartono, 1993, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulder, Niels, 1985, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Schensul, S.L., et.al, 1999, *Essential Ethnographic Methods*, AltaMira Press, California.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeratno, Chamamah, Eds, 2002, *Kraton Jogja The History and Cultural Heritage*, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Indonesia Marketing Association (IMA), Jakarta.
- _____, 2003, "Kata Sambutan" pada *Seminar Menapak Jejak Sejarah Memberi Makna ke Depan*, Yayasan Pengkajian Naskah dan Sejarah, Yogyakarta.
- Suratno, Pardi dan Henniy Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana (Tiara wacana Yogya Grup), Yogyakarta.
- Kompas*, 2005, "Pengabdian dan Pilar Kebudayaan Keraton" 3 Desember, hlm. 35.
- Kompas*, 2005, "Budaya Yogya, Membela Kemanusiaan", 7 Desember, hlm. D.